

Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Krisis Kebakaran pada Masyarakat Simeulue Timur

¹Fitri Meliya Sari, ²Dhiva Chintya

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

¹fitri.meliya@ar-raniry.ac.id, ²200401050@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the disaster communication strategies of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Simeulue Regency in mitigating fire crises in East Simeulue District, identify community responses to mitigation messages, and examine the supporting and inhibiting factors affecting the effectiveness of disaster communication. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques thru observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were purposively selected, including elements from BPBD, village officials, community leaders, and the people of East Simeulue. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, while data validity was tested thru triangulation of sources, techniques, and time. The research results show that the disaster communication strategy of BPBD is carried out thru direct socialization, education, utilization of communication media, delivery of preventive messages, and community involvement in fire mitigation. The community's response to mitigation messages includes cognitive, affective, and conative aspects. The community generally has a positive understanding and attitude, but the implementation of mitigation behaviors is still not optimal. The research concluded that the disaster communication by BPBD has been quite good, but it requires a more participatory and community-based approach to enhance community preparedness and reduce the risk of fires in East Simeulue.*

Keywords: *disaster communication, fire mitigation, Regional Disaster Management Agency (BPBD), community preparedness, East Simeulue.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dalam mitigasi krisis kebakaran di Kecamatan Simeulue Timur, mengidentifikasi respons masyarakat terhadap pesan mitigasi, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat efektivitas komunikasi kebencanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi unsur BPBD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Simeulue Timur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebencanaan BPBD dilakukan melalui sosialisasi langsung, edukasi, pemanfaatan media komunikasi, penyampaian pesan preventif, dan pelibatan masyarakat dalam mitigasi kebakaran. Respons masyarakat terhadap pesan mitigasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif. Masyarakat umumnya memiliki pemahaman dan sikap yang positif, namun implementasi perilaku mitigasi masih belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi kebencanaan BPBD telah berjalan cukup baik, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta mengurangi risiko kebakaran di Simeulue Timur.*

Kata kunci: *BPBD, Kesiapsiagaan Masyarakat, Komunikasi Kebencanaan, Mitigasi Kebakaran, Simeulue Timur.*

PENDAHULUAN

Bencana merupakan salah satu isu global yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan teknologi, dan degradasi lingkungan (Suryandari & Wijayani, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma kebencanaan telah mengalami pergeseran dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction*). Perspektif United Nations Office for Disaster Risk Reduction memandang bencana bukan sekadar peristiwa alam, tetapi merupakan hasil interaksi antara ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), paparan (*exposure*), dan kapasitas (*capacity*) masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut (Purnama Betty, 2018). Dengan demikian, besarnya dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ancaman, tetapi juga oleh tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan efektivitas tata kelola risiko bencana yang dibangun oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Paradigma ini menempatkan komunikasi kebencanaan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun budaya sadar risiko dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Secara global, laporan *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction* dari UNDRR menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Dewi Cahyani Puspitasari et al., 2019). Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang memperbesar tingkat kerentanan dan paparan terhadap risiko bencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi kebencanaan menjadi salah satu elemen penting untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta menginternalisasi perilaku mitigatif dalam kehidupan sehari-hari (Purnama Betty, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia (Tanjung et al., 2020). Letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta kondisi iklim tropis dan karakteristik kepulauan menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam maupun nonalam (Dewi Cahyani Puspitasari et al., 2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari dua ribu kejadian bencana yang berdampak pada jutaan

penduduk, mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia, serta menimbulkan kerusakan puluhan ribu rumah dan fasilitas public (PDSI Pusdatinkom BNPB, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Meskipun bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem mendominasi statistik kebencanaan nasional, ancaman kebakaran permukiman juga menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus (Ayu Sulistyaningtyas et al., 2024). Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sebagian besar dapat dicegah melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan sistem mitigasi. Menurut perspektif manajemen risiko modern, kebakaran terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, seperti kerusakan instalasi listrik, penggunaan sumber api yang tidak aman, rendahnya standar keselamatan bangunan, serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek pencegahan risiko (Agus Sarwono, 2011). Oleh karena itu, keberhasilan mitigasi kebakaran tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pemadaman, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dalam membangun kesadaran dan perilaku preventif masyarakat.

Di Provinsi Aceh, isu kebencanaan memiliki karakteristik yang khas. Pengalaman menghadapi bencana Gempa dan Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 telah membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan Masyarakat (Nada et al., n.d.). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman historis tersebut melahirkan berbagai strategi mitigasi berbasis komunitas dan kearifan lokal. Namun demikian, fokus perhatian masyarakat, pemerintah, dan akademisi masih lebih banyak diarahkan pada ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Di sisi lain, ancaman kebakaran permukiman, khususnya di kawasan perdagangan dan permukiman padat penduduk, masih relatif kurang mendapatkan perhatian, baik dalam kebijakan mitigasi maupun dalam kajian komunikasi kebencanaan (Dhiva Chintya, 2024).

Fenomena tersebut terlihat secara nyata di Kabupaten Simeulue, khususnya Kecamatan Simeulue Timur. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Simeulue periode 2018–2024, tercatat sedikitnya 22 kejadian kebakaran di wilayah ini. Kebakaran besar yang terjadi di Kota Sinabang pada tahun 2019 menghancurkan 30 unit rumah toko dengan total kerugian mencapai sekitar Rp10 miliar. Pada tahun 2023 terjadi enam kasus kebakaran, termasuk kebakaran besar di Desa Suka Jaya yang menghancurkan 23 unit rumah toko dengan total kerugian sekitar Rp18 miliar dan berdampak pada 87 jiwa. Pada

tahun 2024 kembali terjadi kebakaran besar di Desa Sinabang yang menghancurkan 42 unit rumah toko dengan kerugian mencapai Rp31 miliar dan berdampak pada 137 jiwa. Data BPBD Kabupaten Simeulue juga menunjukkan bahwa sekitar 75 persen kejadian kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, sedangkan sisanya disebabkan oleh berbagai bentuk kelalaian manusia, seperti penggunaan instalasi listrik yang tidak layak, penggunaan sumber api yang tidak aman, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran (*BPBD Kabupaten Simeulue | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue*, n.d.).

Tingginya frekuensi kejadian kebakaran di Kecamatan Simeulue Timur merefleksikan adanya kerentanan multidimensional masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Selain kebakaran permukiman yang dominan dipicu oleh korsleting listrik dan kelalaian manusia, wilayah ini juga menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi pantai, gelombang pasang, serta cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis kepulauan. Kerentanan tersebut diperparah oleh kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, kepadatan bangunan pada beberapa kawasan permukiman, keterbatasan sarana mitigasi, serta rendahnya literasi kebencanaan masyarakat. Kurangnya akses terhadap informasi risiko, minimnya pelatihan dan simulasi kebencanaan, serta lemahnya komunikasi mitigasi menyebabkan masyarakat belum memiliki kapasitas adaptif yang memadai dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi kebencanaan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Simeulue Timur (Dhiva Chintya, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mitigasi kebakaran tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan komunikasi yang mampu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi risiko, Vincent T. Covello mendefinisikan komunikasi risiko sebagai proses pertukaran informasi dan pendapat antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat mengenai suatu ancaman atau risiko tertentu. Komunikasi risiko yang efektif harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi, kredibilitas, konsistensi informasi, empati, dan partisipasi public (Covello et al., 1986; Milligan, n.d.). Teori ini relevan dalam konteks mitigasi kebakaran di Simeulue Timur karena dapat menjelaskan bagaimana BPBD menyampaikan informasi mengenai risiko korsleting listrik, penggunaan APAR, prosedur keselamatan, serta berbagai

tindakan preventif yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran.

Selanjutnya, model komunikasi kebencanaan yang dikembangkan oleh Robert R. Ulmer menjelaskan bahwa komunikasi kebencanaan merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana (Sellnow et al., 2009). Model ini menegaskan bahwa komunikasi kebencanaan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam membentuk ketahanan sosial terhadap bencana. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama berada pada fase pra-bencana melalui strategi mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep mitigasi yang dikembangkan oleh UNDRR yang memandang mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi dampak bencana melalui tindakan struktural maupun nonstruktural (UNDRR, n.d.). Mitigasi nonstruktural meliputi edukasi masyarakat, sosialisasi, pelatihan, penyebaran informasi, kampanye kesadaran publik, dan pembentukan budaya sadar risiko. Pendekatan ini menempatkan komunikasi kebencanaan sebagai salah satu instrumen utama dalam membangun kapasitas masyarakat sehingga mampu mengenali ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana (Burhan & Sulkiah, 2026).

Dalam praktiknya, BPBD Kabupaten Simeulue telah melaksanakan berbagai bentuk komunikasi kebencanaan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi di sekolah dan instansi pemerintah, penyebaran brosur dan baliho, pemanfaatan media sosial, serta pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan. Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, keterlambatan pelaporan kejadian kebakaran kepada BPBD, banyaknya masyarakat yang memadati lokasi kebakaran sehingga menghambat proses penanganan, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya tindakan preventif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pesan-pesan mitigasi yang disampaikan BPBD dengan respons dan perilaku masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran (Dhiva Chintya, 2024).

Dari sisi akademik, berbagai penelitian terdahulu mengenai komunikasi kebencanaan di Indonesia lebih banyak berfokus pada mitigasi gempa bumi, tsunami, banjir, pandemi, serta penggunaan media sosial dalam manajemen bencana. Penelitian mengenai komunikasi kebencanaan dalam mitigasi kebakaran permukiman masih relatif terbatas, terutama di

wilayah kepulauan seperti Simeulue. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji aspek teknis penanggulangan bencana atau tingkat kesiapsiagaan masyarakat, sementara kajian mengenai strategi komunikasi BPBD dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi kebakaran masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoritis, empiris, dan kontekstual yang perlu diisi melalui penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian komunikasi kebencanaan dan penanggulangan bencana telah dilakukan, namun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian Misbahuddin berjudul *“Model Komunikasi Humas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh”* membahas model komunikasi humas dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah penanggulangan kebakaran, seperti penggunaan APAR, penanganan kebakaran akibat korsleting listrik, dan prosedur menghubungi petugas pemadam kebakaran. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada model komunikasi humas dalam institusi pemadam kebakaran, sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji komunikasi kebencanaan BPBD dalam mitigasi krisis kebakaran serta respons dan partisipasi masyarakat Simeulue Timur terhadap upaya mitigasi yang dilakukan BPBD (Misbahuddin, 2018).

Kedua, penelitian Muhammad Rifki berjudul *“Pola Komunikasi Organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Penanganan Bencana Gunung Kelud di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri”* menemukan bahwa ACT menggunakan pola komunikasi lingkaran, di mana setiap anggota organisasi dapat berkomunikasi secara setara dalam penanganan bencana. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada pola komunikasi internal organisasi kemanusiaan dalam penanganan bencana alam, sedangkan penelitian ini berfokus pada komunikasi antara BPBD dan masyarakat dalam kegiatan mitigasi krisis kebakaran di Simeulue Timur (Rifki, 2014).

Ketiga, penelitian Aulia Putri berjudul *“Strategi Coping Korban Bencana Kebakaran di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora”* mengkaji dampak psikologis yang dialami korban kebakaran dan strategi coping yang digunakan untuk menghadapi trauma pascakebakaran. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada aspek psikologis korban, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi komunikasi kebencanaan BPBD dalam membangun kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi kebakaran (Aulia Putri, 2023).

Keempat, penelitian R.A. Aurah Zhafirah berjudul *“Manajemen Komunikasi Krisis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan dalam*

Menangani Polusi Udara Akibat Karhutla” membahas pentingnya manajemen komunikasi krisis yang efektif dalam penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada komunikasi krisis antarorganisasi pemerintah dalam penanganan Karhutla, sedangkan penelitian ini mengkaji komunikasi kebencanaan BPBD dalam mitigasi krisis kebakaran permukiman dan respons masyarakat Simeulue Timur terhadap komunikasi yang dilakukan BPBD (R.A. Aurah Zhafirah, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian yang ada lebih banyak membahas model komunikasi humas, pola komunikasi organisasi, strategi coping korban bencana, dan manajemen komunikasi krisis pada berbagai jenis bencana. Sementara itu, penelitian "Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Krisis Kebakaran pada Masyarakat Simeulue Timur" memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji strategi komunikasi kebencanaan BPBD pada tahap mitigasi kebakaran, efektivitas penyampaian pesan mitigasi, serta respons dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko kebakaran di wilayah Simeulue Timur. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian komunikasi kebencanaan yang selama ini masih minim pada konteks mitigasi kebakaran permukiman di daerah kepulauan dan masyarakat lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan yang bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi kebencanaan yang diterapkan BPBD dalam mitigasi kebakaran, mengidentifikasi bentuk respons masyarakat terhadap pesan-pesan mitigasi, serta mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas komunikasi kebencanaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi BPBD dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi komunikasi kebencanaan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis karakteristik sosial budaya masyarakat Simeulue Timur sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana kebakaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses komunikasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dalam mitigasi krisis kebakaran serta respons masyarakat Simeulue Timur terhadap upaya mitigasi tersebut. Menurut John W.

Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif para partisipan (Creswell, 2007; Sari & Ikram, 2025).

Objek penelitian ini adalah komunikasi kebencanaan BPBD dalam mitigasi krisis kebakaran, sedangkan subjek penelitian meliputi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue, pejabat bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, petugas pemadam kebakaran, aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat Simeulue Timur yang pernah mengikuti kegiatan mitigasi atau terdampak kebakaran. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Kriteria Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue	Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program mitigasi kebencanaan	1
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Pejabat yang mengelola program mitigasi, sosialisasi, dan kesiapsiagaan bencana	1
3	Staf/Petugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Pelaksana kegiatan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kebencanaan	2
4	Petugas Pemadam Kebakaran	Personel yang terlibat langsung dalam penanganan dan edukasi kebakaran	2
5	Aparat Desa	Kepala desa atau perangkat desa yang berkoordinasi dengan BPBD dalam mitigasi kebakaran	3
6	Tokoh Masyarakat	Tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan kebencanaan	3
7	Masyarakat Peserta Kegiatan Mitigasi	Warga yang pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, atau simulasi kebakaran yang dilaksanakan BPBD	4
8	Masyarakat Terdampak Kebakaran	Warga yang pernah mengalami atau menjadi korban kebakaran dalam lima tahun terakhir	4
Total			20 Orang

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan BPBD Kabupaten Simeulue, dokumen kebijakan, arsip kebencanaan, jurnal ilmiah, dan

berbagai literatur yang relevan dengan komunikasi kebencanaan dan mitigasi bencana (Creswell & Poth, 2017).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai (Miles & Huberman, 1994).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari BPBD, petugas pemadam kebakaran, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh diharapkan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi komunikasi kebencanaan BPBD dalam mitigasi krisis kebakaran serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Simeulue Timur (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebencanaan BPBD dalam Mitigasi Krisis Kebakaran pada Masyarakat Simeulue Timur

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang terdapat dalam penelitian, strategi komunikasi kebencanaan yang diterapkan BPBD Kabupaten Simeulue dalam mitigasi kebakaran di Kecamatan Simeulue Timur dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan komunikasi, yaitu sosialisasi langsung, komunikasi melalui media, penyampaian himbauan preventif, serta pelibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.

Tingginya intensitas kebakaran di Kecamatan Simeulue Timur menjadi dasar utama penyusunan strategi komunikasi mitigasi. Data BPBD menunjukkan bahwa selama periode 2018–2024 telah terjadi puluhan kasus kebakaran dengan beberapa kejadian besar yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Selain itu, sekitar 75% kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, sedangkan sisanya dipicu oleh kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan lampu tempel, dan anak-anak bermain korek api.

1. Strategi Sosialisasi Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Simeulue menerapkan strategi komunikasi tatap muka sebagai sarana utama penyampaian informasi mitigasi kebakaran. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kelompok sasaran, seperti instansi pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang mengajukan permohonan kegiatan penyuluhan. Kegiatan tersebut meliputi penyampaian materi mengenai penyebab kebakaran, langkah-langkah pencegahan, penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara:

"Komunikasi yang dilakukan pihak BPBD kepada masyarakat Simeulue Timur dalam menangani masalah krisis kebakaran sudah dilaksanakan, seperti sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan anak sekolah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran serta membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran."

Sosialisasi kepada siswa dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk tingkat TK dilakukan kunjungan ke kantor BPBD dengan praktik langsung penggunaan armada pemadam, sedangkan tingkat SMP dan SMA dilakukan penyuluhan di sekolah mengenai penyebab dan penanganan kebakaran. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa sosialisasi kepada masyarakat umum belum berjalan secara rutin. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan:

"BPBD belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum secara langsung, karena belum ada kebijakan dari kantor BPBD tersebut, sosialisasi dilakukan apabila adanya undangan dari pihak instansi maupun masyarakat setempat."

2. Strategi Komunikasi Melalui Media

Selain komunikasi langsung, BPBD juga memanfaatkan media komunikasi sebagai sarana mitigasi kebakaran. Media yang digunakan berupa flyer, brosur, baliho, dan media sosial. Materi komunikasi berisi informasi tentang pencegahan kebakaran, langkah penyelamatan, dan nomor layanan darurat. Brosur ditempatkan di lokasi yang sering dikunjungi masyarakat seperti kantor desa, kantor camat, dan warung kopi. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara:

"BPBD juga melakukan sosialisasi dengan membuat flayer, brosur, serta baliho yang diperbaharui setiap tahunnya dan juga memanfaatkan platform media sosial untuk membagikan informasi tentang penanganan bencana."

Penggunaan berbagai media tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat sehingga pesan mitigasi dapat diterima secara berkelanjutan.

3. Strategi Penyampaian Pesan Preventif

Strategi komunikasi BPBD juga diwujudkan melalui penyampaian himbauan yang bersifat preventif. Isi pesan difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat agar mampu mengurangi risiko kebakaran. Pesan-pesan tersebut meliputi:

- a) berhati-hati menggunakan kompor dan lilin;
- b) tidak membakar sampah sembarangan;
- c) memeriksa instalasi listrik;
- d) menyediakan APAR pada tempat usaha;
- e) tidak membuang puntung rokok sembarangan;
- f) segera melaporkan kejadian kebakaran kepada BPBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa himbauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komunikasi mitigasi untuk membangun budaya sadar bencana.

4. Strategi Pelibatan Masyarakat

BPBD juga mengembangkan strategi komunikasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses penanganan kebakaran. Masyarakat dihimbau untuk:

- a) memberikan akses jalan bagi mobil pemadam;
- b) tidak menjadi penonton di lokasi kebakaran;
- c) membantu menyediakan sumber air;
- d) segera melaporkan kejadian kebakaran;
- e) memberikan dukungan kepada petugas pemadam.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara:

"BPBD Simeulue berharap kerja sama masyarakat agar proses pemadaman berjalan dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan di lapangan."

Selain itu, Kepala Pelaksana BPBD Simeulue, Zulfadli, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat:

"Kesiapsiagaan merupakan salah satu faktor penting bagi masyarakat dalam menghadapi bencana, kesiapsiagaan penting dilakukan untuk mengurangi jumlah korban, masyarakat harus waspada terhadap ancaman dan potensi bencana di daerahnya."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebencanaan BPBD Simeulue dalam mitigasi kebakaran telah mencakup berbagai aspek komunikasi risiko dan mitigasi nonstruktural, yaitu sosialisasi, edukasi, penggunaan media komunikasi, koordinasi lintas sektor, dan penguatan partisipasi masyarakat. Strategi ini sesuai dengan konsep manajemen komunikasi bencana yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dalam mengurangi risiko bencana. Dari perspektif Vincent T. Covello, komunikasi mitigasi yang dilakukan BPBD telah memenuhi prinsip transparansi dan penyampaian informasi risiko. Namun, prinsip partisipasi publik dan pemerataan akses informasi masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan jangkauan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum.

Menurut model komunikasi kebencanaan Robert R. Ulmer, komunikasi yang efektif harus berlangsung secara berkelanjutan pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD lebih banyak berfokus pada kegiatan pra-bencana melalui sosialisasi dan edukasi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan masyarakat.

Dalam perspektif mitigasi UNDRR, edukasi dan pembentukan budaya sadar risiko merupakan strategi utama untuk mengurangi dampak bencana. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai program komunikasi yang dilakukan BPBD telah mengarah pada pembentukan budaya sadar risiko, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, seperti keterlambatan pelaporan kebakaran, rendahnya kepemilikan APAR, serta kebiasaan masyarakat yang memadati lokasi kebakaran.

Dengan demikian, strategi komunikasi kebencanaan BPBD Kabupaten Simeulue dalam mitigasi krisis kebakaran telah berjalan cukup baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sosialisasi langsung, belum optimalnya pemanfaatan saluran komunikasi berbasis komunitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan perilaku mitigasi

kebakaran. Temuan ini menjadi kebaruan penelitian karena menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi kebakaran di Simeulue Timur tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi oleh BPBD, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi partisipatif dan budaya sadar risiko di tingkat masyarakat.

Respons dan Partisipasi Masyarakat terhadap Komunikasi Kebencanaan BPBD dalam Mitigasi Krisis Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa respons masyarakat Simeulue Timur terhadap pesan mitigasi kebakaran yang disampaikan oleh BPBD bersifat beragam. Respons tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu respons kognitif (pengetahuan), respons afektif (sikap), dan respons konatif (tindakan atau perilaku). Variasi respons ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, intensitas sosialisasi, pengalaman menghadapi kebakaran, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Tingginya risiko kebakaran di Kecamatan Simeulue Timur menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa kebakaran merupakan ancaman nyata bagi kehidupan mereka. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat instalasi listrik yang sudah tua, kurangnya pemeliharaan jaringan listrik, serta faktor kelalaian manusia.

1. Respons Kognitif (Pemahaman Masyarakat)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami pesan mitigasi yang disampaikan BPBD mengenai penyebab dan upaya pencegahan kebakaran. Pemahaman tersebut diperoleh melalui sosialisasi, penyebaran brosur, baliho, media sosial, serta pengalaman masyarakat menghadapi kebakaran yang berulang. BPBD secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api dan peralatan listrik serta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Simeulue:

"Menghimbau kepada seluruh masyarakat di 138 desa dalam 10 Kecamatan agar lebih ekstra hati-hati untuk mewaspadaai potensi bencana kebakaran dalam penggunaan api baik di rumah maupun di luar rumah. Hati-hati dalam penggunaan api merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya bencana kebakaran."

Selain itu, BPBD juga menyampaikan berbagai pesan mitigasi seperti pemeriksaan instalasi listrik, penyediaan APAR, serta kewajiban

melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa secara kognitif masyarakat telah menerima informasi yang diberikan oleh BPBD.

2. Respons Afektif (Sikap Masyarakat)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan respons positif terhadap pesan mitigasi yang disampaikan BPBD. Sikap tersebut terlihat dari adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan perlunya kerja sama dalam penanganan bencana. BPBD berharap masyarakat tidak hanya memahami informasi yang diberikan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan bersama. Dalam hasil wawancara dijelaskan:

"BPBD Simeulue berharap kerja sama masyarakat agar proses pemadaman berjalan dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan di lapangan."

Selain itu, BPBD juga mengharapkan masyarakat memberikan dukungan moral kepada petugas pemadam kebakaran dan membantu menyediakan kebutuhan dasar selama proses pemadaman berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa secara afektif masyarakat memiliki kepedulian terhadap upaya mitigasi kebakaran, meskipun tingkat partisipasinya belum merata.

3. Respons Konatif (Perilaku Masyarakat)

Pada aspek perilaku, hasil penelitian menemukan adanya dua bentuk respons masyarakat, yaitu perilaku yang mendukung mitigasi dan perilaku yang menghambat efektivitas komunikasi kebencanaan.

a. Respons Positif

Sebagian masyarakat telah menerapkan pesan mitigasi yang diberikan BPBD, seperti:

- 1) membantu proses pemadaman;
- 2) memberikan akses jalan bagi mobil damkar;
- 3) menyediakan sumber air;
- 4) memberikan bantuan kepada petugas;
- 5) segera melaporkan kejadian kebakaran.

Hal ini sesuai dengan himbauan BPBD agar masyarakat turut berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran.

b. Respons Negatif

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum merespons pesan mitigasi secara optimal. Dalam hasil wawancara disebutkan:

"Kenyataannya, masyarakat Simeulue Timur ada saja yang tidak merespon dengan baik harapan dari BPBD sehingga ketika proses pemadaman pada kebakaran masih terjadi beberapa hambatan."

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk respons negatif masyarakat meliputi:

- 1) datang beramai-ramai untuk menonton kebakaran;
- 2) memadati lokasi kejadian;
- 3) menghambat akses mobil pemadam;
- 4) kurang membantu proses pemadaman;
- 5) terlambat memberikan informasi kepada BPBD sehingga petugas sering menerima laporan ketika api sudah membesar.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara:

"Kurangnya informasi bencana kebakaran secara langsung kepada pihak BPBD karena BPBD selalu menerima informasi saat api sudah membesar, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Simeulue Timur terhadap krisis kebakaran menjadi penghambat proses komunikasi saat proses pemadaman api di lapangan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pesan mitigasi kebakaran BPBD Simeulue Timur dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu respons kognitif, respons afektif, dan respons konatif (perilaku). Menurut teori komunikasi risiko Vincent T. Covello, perubahan perilaku merupakan tujuan akhir komunikasi risiko. Sementara itu, model komunikasi kebencanaan Robert R. Ulmer menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan perspektif mitigasi UNDRR, yang menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi harus mampu membentuk budaya sadar risiko dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat Simeulue Timur terhadap pesan mitigasi kebakaran BPBD pada aspek pengetahuan dan sikap sudah tergolong positif, tetapi pada aspek

perilaku masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerimaan pesan mitigasi dengan implementasi tindakan nyata di lapangan, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas mitigasi kebakaran di Simeulue Timur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Komunikasi Kebencanaan BPBD dalam Mitigasi Krisis Kebakaran pada Masyarakat Simeulue Timur

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, efektivitas komunikasi kebencanaan BPBD Kabupaten Simeulue dalam mitigasi kebakaran dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek kelembagaan, media komunikasi, karakteristik masyarakat, serta pola interaksi antara BPBD dan masyarakat sebagai penerima pesan mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebencanaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan BPBD dalam menyampaikan informasi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap pesan-pesan mitigasi yang disampaikan.

1. Faktor Pendukung Efektivitas Komunikasi Kebencanaan
 - a. Tingginya Kesadaran BPBD terhadap Pentingnya Mitigasi Kebakaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Simeulue memiliki komitmen untuk melakukan upaya mitigasi kebakaran melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari himbauan yang disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Simeulue, Zulfadli:

"Menghimbau kepada seluruh masyarakat di 138 desa dalam 10 Kecamatan agar lebih ekstra hati-hati untuk mewaspadaai potensi bencana kebakaran dalam penggunaan api baik di rumah maupun di luar rumah. Hati-hati dalam penggunaan api merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya bencana kebakaran."

Komitmen tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunikasi mitigasi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

- b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan

BPBD secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada berbagai kelompok sasaran, seperti instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Pelaksanaan sosialisasi tersebut menjadi faktor pendukung karena

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran.

c. Pemanfaatan Berbagai Media Komunikasi

Selain komunikasi langsung, BPBD juga menggunakan berbagai media informasi untuk menyampaikan pesan mitigasi. Penggunaan berbagai media tersebut memperluas jangkauan komunikasi dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi kebencanaan.

d. Dukungan dan Partisipasi Sebagian Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memberikan dukungan terhadap kegiatan mitigasi kebakaran yang dilakukan BPBD. BPBD mengharapkan masyarakat membantu proses penanganan kebakaran dengan memberikan akses jalan, menyediakan sumber air, dan mendukung petugas di lapangan. Dalam hasil wawancara disebutkan:

"BPBD Simeulue berharap kerja sama masyarakat agar proses pemadaman berjalan dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan di lapangan."

Partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas komunikasi kebencanaan.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Komunikasi Kebencanaan

a. Sosialisasi kepada Masyarakat Umum Belum Optimal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD belum melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum secara rutin. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara:

"BPBD belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum secara langsung, karena belum ada kebijakan dari kantor BPBD tersebut, sosialisasi dilakukan apabila adanya undangan dari pihak instansi maupun masyarakat setempat."

Kondisi ini menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi mitigasi secara merata.

b. Rendahnya Respons Sebagian Masyarakat

Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat belum memberikan respons yang sesuai terhadap pesan mitigasi yang disampaikan BPBD. Dalam hasil wawancara disebutkan:

"Kenyataannya, masyarakat Simeulue Timur ada saja yang tidak merespon dengan baik harapan dari BPBD sehingga ketika proses pemadaman pada kebakaran masih terjadi beberapa hambatan."

Kurangnya kepatuhan terhadap himbauan BPBD menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas komunikasi kebencanaan.

c. Keterlambatan Penyampaian Informasi Kebakaran

Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada BPBD. Keterlambatan informasi tersebut menyebabkan penanganan kebakaran menjadi kurang optimal.

d. Perilaku Masyarakat yang Menghambat Penanganan Kebakaran

Penelitian menemukan bahwa banyak masyarakat yang datang untuk menonton kebakaran sehingga menghambat akses mobil pemadam. Hasil di lapangan menjelaskan adanya:

- 1) ramainya masyarakat yang datang menonton;
- 2) kurangnya kesadaran membantu proses pemadaman;
- 3) kendaraan yang menghalangi akses armada pemadam.

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa pesan mitigasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tindakan nyata.

4) Kurangnya Intensitas Komunikasi Mitigasi

Penelitian juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi hambatan dalam membangun kesadaran kebencanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara:

"Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Simeulue Timur terhadap krisis kebakaran menjadi penghambat proses komunikasi saat proses pemadaman api di lapangan."

Kurangnya frekuensi komunikasi menyebabkan internalisasi pesan mitigasi belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebencanaan BPBD dalam mitigasi kebakaran di Simeulue Timur dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari sisi pendukung, keberadaan BPBD sebagai lembaga resmi, penggunaan berbagai media komunikasi, dukungan tokoh masyarakat, dan pengalaman masyarakat menghadapi kebakaran telah membantu penyebaran pesan

mitigasi. Faktor-faktor tersebut memperkuat dimensi informasi dan koordinasi dalam komunikasi kebencanaan.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya perilaku sadar risiko, keterlambatan pelaporan kebakaran, gangguan terhadap proses pemadaman, serta keterbatasan sosialisasi langsung menjadi hambatan utama efektivitas komunikasi kebencanaan. Dalam perspektif Vincent T. Covello, hambatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi risiko belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi publik, konsistensi informasi, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, menurut model komunikasi kebencanaan Robert R. Ulmer, komunikasi yang efektif harus berlangsung secara berkelanjutan pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perspektif UNDRR juga menegaskan bahwa mitigasi nonstruktural tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan budaya sadar risiko melalui edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Simeulue Timur, temuan penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan fungsi komunikasi mitigasi dengan cukup baik, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dengan demikian, faktor pendukung efektivitas komunikasi kebencanaan BPBD meliputi dukungan kelembagaan, pemanfaatan media komunikasi, keterlibatan tokoh masyarakat, dan pengalaman kolektif masyarakat terhadap kebakaran. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya perilaku sadar risiko, keterlambatan penyampaian informasi, gangguan terhadap proses pemadaman, serta belum optimalnya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas komunikasi kebencanaan memerlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan guna membangun masyarakat Simeulue Timur yang tangguh terhadap risiko kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dalam mitigasi krisis kebakaran pada masyarakat Simeulue Timur telah dilaksanakan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi tatap muka, edukasi di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah, penyebaran brosur dan baliho, pemanfaatan media sosial, serta

penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kebakaran. Strategi tersebut menunjukkan bahwa BPBD telah berupaya menjalankan fungsi komunikasi kebencanaan pada tahap prabencana dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pesan mitigasi kebakaran bersifat beragam. Sebagian masyarakat memberikan respons positif dengan mengikuti imbauan BPBD, membantu proses pemadaman, dan mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Namun, masih ditemukan respons negatif berupa rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, keterlambatan pelaporan kejadian kebakaran, perilaku yang berpotensi memicu kebakaran, serta kebiasaan memadati lokasi kebakaran yang justru menghambat proses penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian pesan mitigasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sadar risiko.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komunikasi kebencanaan BPBD didukung oleh keberadaan kelembagaan yang kuat, pemanfaatan berbagai media komunikasi, keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat, serta pengalaman masyarakat yang sering menghadapi kejadian kebakaran. Sebaliknya, efektivitas komunikasi masih dihambat oleh terbatasnya sosialisasi langsung kepada masyarakat umum, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterlambatan penyampaian informasi kepada BPBD, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung penanganan kebakaran.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa komunikasi kebencanaan BPBD Kabupaten Simeulue dalam mitigasi krisis kebakaran telah berjalan dengan baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam membangun perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, penulis menyetujui bahwa komunikasi kebencanaan merupakan instrumen penting dalam pengurangan risiko kebakaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Sebagai rekomendasi, BPBD Kabupaten Simeulue perlu mengembangkan model komunikasi kebencanaan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas dengan memperluas sosialisasi langsung hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan

kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta media lokal untuk memperluas jangkauan pesan mitigasi. Edukasi mengenai keselamatan instalasi listrik, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), prosedur pelaporan kebakaran, dan peran masyarakat dalam mendukung proses pemadaman perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan simulasi rutin. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi kebencanaan, khususnya terkait mitigasi kebakaran permukiman, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji efektivitas komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal dan media digital dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sarwono. (2011). Kriteria Kelayakan Penerapan Fire Safety Management (FSM) Pada Bangunan Gedung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 1–8.
- Aulia Putri. (2023). *Strategi Coping Korban Bencana Kebakaran di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ayu Sulistyaningtyas, S., Laila Nugraha, A., & Hadi, F. (2024). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus: Kecamatan Banyumanik Dan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip Januari*.
- BPBD Kabupaten Simeulue | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue. (n.d.). Retrieved June 17, 2026, from <https://bpbd.simeuluekab.go.id/>
- Burhan, L. I., & Sulkiah. (2026). Model Edukasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas dalam Kerangka Community-Based Disaster Risk Reduction untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.63982/dharmabakti.ndgyfy90>
- Covello, V. T., Detlof von Winterfeldt, & Paul Slovic. (1986). *Risk Communication: A Review of the Literature*.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among the Five Approaches* (2nd ed.) . Sage Publication. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3320605>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design*. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Inquiry_and_Research_Design.html?hl=id&id=gX1ZDwAAQBAJ
- Dewi Cahyani Puspitasari, Mei Nurul Aini, & Rina Satriani. (2019). Penguatan Resiliensi dan Strategi Penghidupan Masyarakat Rawan Bencana. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.592>
- Dhiva Chintya. (2024). *Respon Masyarakat Simeulue Timur Terhadap Krisis Kebakaran*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Milligan, P. A. (n.d.). *Covello and Milligan - Risk Communication - Principles, Tools, & Techniques*.

- Misbahuddin. (2018). *Model Komunikasi Humas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Nada, Q., Furqan, M. H., Yulianti, F., Pendidikan, J., Fkip, G., Syiah Kuala, U., Jurusan, D., & Geografi, P. (n.d.). *Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Pada Komunitas Sekolah Sdn 21 Banda Aceh*. <https://doi.org/10.24815/jpg.v%vi%i.28009>
- PDSI Pusdatinkom BNPB. (2025). *Buku Data Bencana Indonesia tahun 2024*.
- Purnama Betty. (2018). Budaya Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami (Kajian Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat). *Jurnal Vokasi Indonesia*. <https://elicit.com/find-papers/f688a706-798a-4a85-bf44-225759d30dee>
- R.A. Aurah Zhafirah. (2023). *Manajemen Komunikasi Krisis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan dalam Menangani Polusi Udara Akibat Karhutla*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=B-F4b5cAAAAJ&citation_for_view=B-F4b5cAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Rifki, M. (2014). Pola Komunikasi Organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dalam Penanganan Bencana Gunung Kelud Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah*.
- Sari, F. M., & Ikram, M. R. (2025). Transformasi Nilai Qawlan Layyinan dalam Relasi Keluarga Modern di Kecamatan Darussalam. *Sadida Islamic Communications and Media Studies*, 5(2), 82–109. <https://doi.org/10.22373/YP19XF14>
- Sellnow, T. L., Ulmer, R. R., Seeger, M. W., & Littlefield, R. S. (2009). Effective Risk Communication. In *Effective Risk Communication*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-79727-4>
- Suryandari, N., & Wijayani, Q. N. (2022). Mewaspadaai Bencana: Perspektif Global tentang Komunikasi Risiko Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 162–169. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47497>
- Tanjung, R., Mulyadi, D., Arifudin, O., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen Mitigasi Bencana*.
- UNDRR. (n.d.). *UNDRR Buku Petunjuk Khusus Guru tentang Program Keselamatan Sekolah (SD)*.

